

# Legal Protection of The Human Rights of Street Children According to National and International Law in Education Perspective

**DITO HENDRO PRAKOSO**

Program Studi PPKn, Universitas Islam Nusantara, Bandung

## **Abstract**

*Street children are a serious problem, especially in provincial capitals and big cities. Their existence often causes various problems of traffic, order and urban security. This situation needs attention, because street children are the next generation who need to be educated and guided so that they can grow and develop naturally. Street children, however, have become a phenomenon that demands everyone's attention. party. The existence of this research raises the problem, namely: First, what is the meaning of street children, Second, how is the violation of children's human rights in the field of education, Third, how are the efforts to protect the human rights law of street children in the field of education. The study method is a juridical-normative method by examining national legislation and international conventions related to children's human rights in the field of education. The results showed that the form of violations of street children's human rights in the field of education was an act of neglect by the government.*

**Keyword:** Party Recruitment; Internalization; Social Care.

Part of the contents in journal:

Development of Civic Education Learning Activity Using a Smartphone Application.....	1
Political Education, Community Political Participation and Relevance to Civic Education .....	17
The Impact of Use Technology in Morality Forming of Student Learning .....	31
<b>Legal Protection of The Human Rights of Street Children According to National and International Law in Education Perspective .....</b>	<b>41</b>
The Impact of Scouting Coaching on Student Social Responsibility .....	55

## **PENDAHULUAN**

Anak jalanan merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, dan oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus (Makara, 2013: 1).

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dan tingkat makro sampai mikro (Makara, 2013: 31). Karena anak sebagai makhluk

sosial juga sebagai makhluk individual, artinya bahwa tiap-tiap anak itu merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya (Gerungan, 2002: 23), maka sangat diperlukan perlindungan terhadap anak baik dilakukan oleh orang tuanya maupun oleh pemerintah, karena masa depan anak merupakan masa depan bangsa.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama (Barda Nawawi Arief, 2007: 65). Negara kita pun menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Sebagai negarahukum, salah satu cirinya adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena pada dasarnya hak-hak asasi manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa melekat pada kehidupan dan peradaban manusia itu

sendiri. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal yang tersusun dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Bunyi pasal tersebut, dapat diartikan sebagai bentuk hak asasi setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, keadilan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Unbanunaek Mimi, et al, 1995: 45). Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha

perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. Dalam proses peradilan pidana anak, anak-anak ini tidak mengetahui hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi (Unbanunaek Mimi, et al, 1995: 47).

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain: tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas; untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggungjawab dan bermanfaat dalam proses tersebut (Prakoso, 2013: 21).

Perlindungan terhadap hak anak telah ditetapkan dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi

Konvensi Hak Anak/KHA (Convention on The Rights of The Child) Tahun 1989 di Jenewa dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara (Asnawi, 2010). Isu konvensi tersebut telah menghasilkan komitmen yang saksama untuk memberikan prioritas utama kepada hak-hak anak, kelangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan mereka (Indriati, 2014).

Di Indonesia, gerakan global terhadap perhatian dan peningkatan hak anak tersebut telah dimasukkan dalam amandemen ke-3 UUD NRI 1945. Beberapa pasal yang menjadi landasan konstitusional perlunya perhatian dan peningkatan hak-hak anak, seperti diatur dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 4 UU No.6 Tahun 1974, Pasal 11,12 dan 13 UU Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 55 -58 UU Nomor 23 Tahun 2002 dan PP Nomor 2 Tahun 1999 yang memberikan delapan (8) kewenangan kepada Mensesos RI untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial bagi anak. Beberapa ketentuan tersebut menunjukkan secara tegas betapa pentingnya perhatian dan peningkatan hak-hak anak untuk senantiasa diperjuangkan karena ia telah menjadi hak konstitusional dan gerakan masyarakat internasional. Meskipun demikian dalam realitasnya, banyak hak-hak anak yang sudah diatur dalam konstitusi dan

beberapa ketentuan perundang-undangan serta konvensi internasional yang berlaku namun belum dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Begitulah dengan masalah anak jalanan, pemerintah wajib menetapkan program kebijakan yang mendukung hak-hak anak untuk menyelamatkannya. Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan, menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, utilitas, dan lainnya.

Akhir-akhir ini, banyak berita melalui media cetak dan elektronik adanya fenomena perdagangan anak ataupun munculnya anak jalanan yang merupakan bagian dari beberapa persoalan sosial yang mengancam kehidupan anak. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa sekitar 8,4 juta anak di seluruh dunia terjebak dalam pembunuhan, perdagangan, pelacuran, pornografi serta pekerjaan terlarang dan 1,2 juta anak-anak ini telah diperdagangkan. Berdasarkan statistik ILO tahun 2002, tercatat 264 juta anak yang terpaksa bekerja 7,3 juta diantaranya berusia dibawah 10 tahun. Tidak ada satu Negara pun yang terlepas dari permasalahan tersebut. selain itu, terdapat sekitar 2,5 juta pekerja anak di Negara-negara maju dan 2,5 juta di Negara yang ekonominya dalam masa transisi, seperti bekas Negara Uni Soviet, hampir setiap tahun, sekitar 22.000 anak meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Angka terbesar, sebanyak 127 anak yang belum, berusia 14 tahun yang terpaksa bekerja di kawasan Asia-Pasifik. Jumlah tertinggi pekerja anak terdapat di Sub-Sahara Afrika, hampir tiga perempat anak-anak berusia 14 tahun ke bawah, sekitar 48 juta anak berada di dunia kerja pekerja anak umumnya bekerja di sector informal dan tidak memiliki perlindungan wajib. Bahkan,

hampir 70% di antara mereka bekerja di sektor pertanian, perburuan komersial, perikanan serta kehutanan(Depsos, 2006).

Berdasarkan ketentuan dan realitas kondisi anak pada umumnya, tampak bahwa yang berperan aktif dan bertanggungjawab dalam penegakan dan perlindungan hak-hak asasi anak jalanan, terutama dalam bidang pendidikan dipegang oleh Negara yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk menjawab isu tersebut penulis tertarik untuk merekonstruksi tanggung jawab pemerintah dalam hal penegakan dan perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan agar dapat diketahui perlunya perubahan paradigma penegakan dan perlindungan hak-hak asasi anak, termasuk anakjalanan sebagaimana telah diatur dalam hukum nasional dan internasional.

## **PEMBAHASAN**

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya (Suyanto, 2010). Menurut Departemen Sosial RI (1999), pengertian tentang anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti

ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan.

UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu *Streetchild are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life*. Berdasarkan hal tersebut, maka anak jalanan adalah anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan berpindah-pindah di jalan raya (Soedijar, 1998).

Anak jalanan atau gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, yang secara yuridis tidak berdomisili secara otentik. Disamping itu mereka merupakan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, menurut ukuran masyarakat pada umumnya dan sebagian besar dari mereka tidak mengenal nilai-nilai keluhuran (Sudarsono, 2009).

Anak jalanan, anak gelandangan, atau disebut juga secara eufimistis sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang. Kebanyakan dalam usia yang relatif dini mereka sudah harus berhadapan dengan

lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum (Suyanto, 2010). Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, dari segi kesehatan maupun sosial. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, ter subordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari keluarga, ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab (Suyanto, 2010).

Menurut Sadli (Sudarsono, 2009) anak jalanan memiliki ciri khas baik secara psikologisnya maupun kreativitasnya, sebagai berikut :

1. Mudah tersinggung perasaannya,
2. Mudah putus asa dan cepat murung,

3. Nekat tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya,
4. Tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang,
5. Tidak mau bertatap muka dalam arti bila mereka diajak bicara, mereka tidak mau melihat orang lain secara terbuka,
6. Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak, mereka sangatlah labil,
7. Mereka memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai bila diukur dengan ukuran normatif masyarakat umumnya.

Penegakan terhadap hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan (pendidikan dasar) tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai penanggungjawab pelayanan penyelenggaraan hak-hak publik. Dalam berbagai teori HAM dan doktrin hukum publik menunjukkan bahwa penyelenggara pendidikan dalam suatu Negara dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan sepenuhnya oleh suatu pemerintahan. Konsep dan teori serta konvensi internasional secara tegas menunjukkan bahwa masalah penegakan hak-hak asasi anak, termasuk akan jalanan

dalam bidang pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan secara normatif dibebankan kepada pemerintah selaku pemegang amanah konstitusi Negara.

Peletakan kewajiban pemerintah dalam hal dimaksud merupakan bagian dari upaya penegakan hak-hak yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial semata akan tetapi ditekankan sama dengan penegakan hak-hak sipil dan hak-hak politik. Artinya, setiap orang (anak jalanan) berhak mendapatkan hak asasinya dalam bidang pendidikan sehingga melalui pendidikan disetiap jenjangnya anak jalanan akan terbina sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia universal. Akan tetapi selama hal itu belum terlaksana oleh pemerintah dapat dipandang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak jalanan yang mengakibatkan kemerosotan dalam kualitas pendidikan anak bangsa sebagai amanat konstitusi Negara. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak asasi anak jalanan seharusnya sudah dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah bukan hanya secara politis, moral akan tetapi dapat dipertanggungjawabkan yuridis.

Adapun landasan teoretik yang dapat digunakan merekonstruksi dapat dipertanggungjawabkannya pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan dasar dapat terwujud dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Pelanggaran karena tindakan (Violence by Action), yang terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang baik disengaja ataupun tidak.
- b. Pelanggaran karena pembiaran, (Violence by Omission), terjadi karena seseorang / kelompok orang membiarkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia atau tindak pidana kejahatan / pelanggaran hukum.
- c. Pelanggaran hak asasi manusia dari segi substansi peraturan perundang-undangan (Legislatif Violence). Jenis pelanggaran demikian mengacupada substansi undang-undang yang belum memuat asas-asas, aturan-aturan yang berwawasan hak asasi manusia.

Dalam realitasnya, keberadaan anak jalanan dengan segala bentuk dan peranannya menurut penulis sudah merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah dan termasuk kategori violence by omission yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis

kepada pemerintah. Sebab, melakukan pembiaran bagi mereka berkeliaran di jalanan secara otomatis meninggalkan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan. Padahal, alokasi waktu bagi mereka sudah ditentukan untuk mengikuti pendidikan pada jenjangnya yang penyelenggaraannya diharapkan memperoleh hak-hak asasinya dalam bidang pendidikan. Terbaikannya hak-hak tersebut seharusnya sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menertibkan mereka dan mengembalikannya ke sekolah atau menempatkannya dalam sebuah lembaga panti sosial yang memungkinkan mereka mendapat hak-hak dalam bidang pendidikan.

Pemenuhan terhadap hak-hak dasar bagi anak jalanan merupakan salah satu faktor pendorong bagi terwujudnya kebahagiaan setiap anak manusia yang sekaligus mempererat hubungan keluarga dalam kehidupan masyarakat yang tergolong tidak mampu. Sedangkan bagi suatu bangsa, sosok anak sangatlah penting terutama sebagai generasi yang nantinya bakal melanjutkan kepemimpinan bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, pembinaan anak dengan hak-hak asasinya dalam bidang pendidikan harus diberi



perhatian dan perlakuan istimewa, mengingat merekalah yang kelak akan memberi cerminan bagaimana corak dan eksistensi kehidupan suatu bangsa dimasa depan. Terkait dengan eksistensi anak tersebut sesungguhnya banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa baik menyangkut masalah kejiwaan anak itu sendiri, masalah yang terjadi dalam hubungan sosial budaya serta ekonomi dalam lingkungan keluarganya yang pada hakikatnya persoalan hak asasi anak bukan saja masalah pendidikan tetapi berkaitan erat dengan masalah ekonomi keluarga. Banyaknya anak-anak menjadi anak jalanan umumnya didorong oleh faktor ekonomi, broken home, hilangnya perhatian dan kasih sayang orang tuanya dan pengaruh lingkungan sosialnya.

Upaya mempersiapkan masa depan anak-anak bangsa dilakukan pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam kaitan itulah Indonesia turut meratifikasi konvensi hak anak (KHA) yang berisi pengaturan perlindungan anak. Oleh karena itu, setiap Negara peserta (parties) termasuk Indonesia, berkewajiban melaksanakan isi kesepakatan-kesepakatan konvensi internasional melalui hukum nasional masing-masing Negara guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi pada anak, termasuk anak jalanan. Selain

itu, pada tanggal 24 september 2001, Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani tiga konvensi internasional lainnya, yakni dua konvensi mengenai perlindungan hak anak yaitu hak anak berkaitan dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (optional protocol to the convention of the rights of the child on the involvement of children in armed conflict) yang dibuat di New York pada tahun 2000 dan hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak (optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution, and child pornography) yang juga dibuat di New York tahun 2000.

Selanjutnya, konvensi lainnya yang berkaitan dengan penghentian pembiayaan terorisme (international convention for the suppression of the financing of terrorism) dibuat di New York pada desember tahun 1999. Konvensi tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masa depan anak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan bangsa dan Negara di masa depan. Selanjutnya, pada tanggal 25 Agustus 1990 dan berdasarkan Keppres Nomor 36/1990, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak yang mulai berlaku di Indonesia sejak 5 oktober

1990. Ini berarti bahwa tanpa mengabaikan ketentuan internasional, pemerintah Indonesia menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai acuan utama dalam menindaklanjuti pengaturan hak asasi anak untuk memperoleh pendidikan. Kuatnya dukungan internasional terhadap perlindungan hak asasi anak (termasuk anak jalanan) dalam bidang pendidikan diatur lebih lanjut dalam konvensi hak anak (Convention On the Rights Of The Child) yang ditetapkan oleh PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 (United Nations High Commissioner On Human Right, 1989).

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989 dinyatakan bahwa hak-hak anak melekat dalam diri anak dan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konvensi. Menurut konvensi ini yang dianggap sebagai anak adalah semua manusia yang berusia usia 18 tahun kebawah (Pasal 1), termasuk mereka yang menderita penyakit mental atau kejiwaan, serta mereka yang secara fisik mengalami keterbatasan. Mereka hendaknya mendapat perlakuan yang sama demi mendapatkan dorongan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi masyarakat luas (Pasal 23 ayat 1). Konvensi ini pula menentukan bahwa pihak-pihak yang dianggap mempunyai keterkaitan dalam penyediaan

hak pada anak untuk tidak mengesampingkan ketentuan yang berada dalam konvensi ini, sehingga negara dianggap tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap masalah penyediaan hak pada anak tersebut.

Penguatan terhadap perlunya penegakan hak asasi anak, termasuk anak jalanan sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan dimaksud. Bahkan ketentuan ini mengharuskan semua pihak peserta konvensi untuk bekerjasama dalam menyediakan akses pendidikan demi terciptanya pendidikan yang mandiri. Demikian pula masyarakat di suatu tempat harus mampu berinisiatif dan berkorban untuk bekerjasama mendirikan sekolah-sekolah atau kegiatan-kegiatan pendidikan baik formal maupun nonformal. Dalam kaitan itu, kuatnya kepedulian masyarakat internasional terhadap pemenuhan hak atas pendidikan disikapi oleh negara peserta/penandatangan konvensi melalui pertemuan/ kesepakatan. Antara lain kesepakatan Menteri Negara Asia Tenggara tanggal 26 Mei 2004 di Bangkok menyepakati :

- a. peningkatan terhadap akses, dan kualitas pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak;
- b. mempromosikan program yang sistematis dari pembangunan kapasitas dan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat yang mempromosikan kemitraan sekolah masyarakat dan pemberdayaan stakeholder pendidikan;
- c. membangun kemitraan yang lebih efektif serta mengkolaborasikan dengan negara lain dalam upaya mencapai kualitas pendidikan dari perspektif menyeluruh.

Bahkan, UNESCO dalam pertemuan itu menegaskan kembali bahwa pada tahun 2015 semua anak memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas. Dalam suatu simposium internasional, 500 peserta dari 30 negara merekomendasikan bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya antara lain :

1. Konsep kualitas seyogyanya difokuskan pada perkembangan sosial, emosi dan fisik, maupun pencapaian akademik anak; Orang dewasa seyogyanya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang karakteristik

maupun keadaan individunya, serta mempertimbangkan pandangannya;

2. Demi menjamin pendidikan untuk semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap anak, maka masalah non-diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi SRA, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara badan-badan pemerintah dan non-pemerintah, donor, masyarakat, berbagai kelompok lokal, orang tua, anak maupun sektor swasta;
3. Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi non-pemerintah, seyogyanya berkolaborasi dan mengkoordinasikan upayanya untuk mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak;
4. Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh karena itu seyogyanya mencakup semua anak usia sekolah dalam sistem informasi manajemen pendidikannya;
5. Program pendidikan pra-jabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru seyogyanya direvisi guna mendukung pengembangan praktek

inklusi sejak usia pra-sekolah dengan menekankan pada pemahaman tentang perkembangan anak dan belajar secara holistik termasuk intervensi dini;

6. Pemerintah (pusat, provinsi dan lokal) dan sekolah seyogyanya membina dan memelihara dialog dengan masyarakat, termasuk orang tua, tentang nilai-nilai sistem pendidikan yang non-diskriminatif dan inklusif.

## **KESIMPULAN**

Anak jalanan adalah anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan serta berpindah-pindah dan hidup di jalan raya.

Pelanggaran anak dalam bidang pendidikan adalah pelanggaran karena tindakan (Violence by Action), Pelanggaran karena pembiaran, (Violence by Omission)

dan Pelanggaran hak asasi manusia dari segi substansi peraturan perundang-undangan (Legislatif Violence).

Upaya perlindungan hukum hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan harus adanya perlindungan (protection), nilai kelangsungan hidup (survival), perkembangan (development), pemeliharaan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan fisik, moral sosial dan mental spiritual. Maka Harusnya ketentuan hukum mengenai pendidikan anak adalah memiliki keserasian regulasi baik ditingkat praturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dan kabupaten yang memuat adanya ketentuan baik dari segitanggung jawab, hingga pada keterlibatan masyarakat di dalam melakukan pengelolaan pendidikan yang berdasarkan pada cita dasar negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Habib Shulton. (2013.) "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, 239-260: 240.
- Astari, Prima. (2015). "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.1, 1-18: 2.
- Bahar, Saafroedin. (1996). *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prakoso, Abintoro, (2013), *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Purwoko, Tjutjup. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan", *Journal Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, 13-25: 14 Effendy, H.A. Mansyur, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fattah, Virgayani. (2017). "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 2, 355-378: 358-359.
- Indriati, Noer. (2014). "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014, 406-418: 408
- Muzaffar, Chandra. (1995). *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat*. Terjemahan oleh Poerwanto. Bandung: Mizan.
- Prasetyo, Eko. (2001). *HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*. Yogyakarta: Insist Press.
- Shanty Dellyana, (1998). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Simanjuntak, Nikolas, (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmar. (2017). "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No.1, 43-53, hal.44.
- Thontowi, Jawahir. (2002). *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*. Yogyakarta: Madyan Press.
- Waddong, Maulana Hassan. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Waluyo, Bambang, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, I Gede Arya B. (2005). *Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas, Quo Vadis? Dalam Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.